

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Disusun dan Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat mencapai Gelar
Sarjana Akuntansi Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Akuntansi*



Oleh :

**DARTIAN PRASETYO
150412014**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGGINGI TELUK
KUANTAN**

2020

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Oleh :

DARTIAN PRASETYO
150412014

PROGAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGGINGI TELUK
KUANTAN

2020

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGING PADA BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Orang tua Penulis serta Saudara Penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, Juni 2020
Penulis,

DARTIAN PRASETYO
NPM. 150412014

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dartian Prasetyo (2020)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi, bahwa anggaran maupun belanja tidak langsung dari tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan namun belum teralisisasi sepenuhnya.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja belanja daerah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi berdasarkan rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja tahun 2017 dan 2019.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Deskriptif merupakan salah satu bentuk Metode Penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai Setting Sosial atau untuk Eksplorasi dan Klarifikasi, yang terbentuk dengan cara Mendeskripsikan suatu Fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran yang kokoh dengan menggunakan rumus matematis. Maka desain penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil Penelitian adalah Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari pertumbuhan belanja megalami kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari keserasian belanja masuh kurang serasi karena seharusnya antara operasi dan belanja modal dan antara belanja langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari efisiensi belanja maka sudah baik karena rata-rata belanja dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penghematan belanja.

Kata Kunci: Kinerja Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran

ABSTRACT

ANALYSIS PERFORMANCE IN THE EXPENDITURE AREA IN BUDGET REALIZATION REPORT (LRA) OF REGENCY OF KUANTAN SINGINGI

Dartian Prasetyo (2020)

This research of background by Realize Budget Report (LRA) of Regency of Kuantan Singingi, that indirect expense and also budget of year 2016 up to 2019 always experience of improvement but not yet teralisasi fully. Target of this Research is to know expense performance Report a Realize Budget (LRA) of Regency of Kuantan Singingi pursuant to ratio growth of expense, ratio compatibility of expense, and year expense efficiency ratio 2017 and 2019.

This research have the character of descriptive and use quantitative date analysis with desain research of kausal. Deskriptif represent one of functioning Method Research form to present complete picture Social Setting or for the Eksplorasi of and Clarification, formed by deskriptif a Phenomenon events that happened in human life. Quantitative is research pursuant to at date able to be counted to yield sturdy estimating with mathematical formula give. Hence this research desain aim to to analyse Analysis Performance In The Expenditure Area In Budget Realization Report (LRA) of Regency of Kuantan Singingi At Departement of Finance and Asset.

Result of Research is Performance In The Expenditure Area In Budget Realization Report (LRA) of Regency of Kuantan Singingi when seen from growth of expense of tendency which is behind with condition of which is Expense. Performance In The Expenditure Area In Budget Realization Report (LRA) of Regency of Kuantan Singingi when seen from compatibility of expense of in less compatible because ought to between capital expense and operation and between indirect and direct expense have to be adapted for portion each and experience of increase each every Expense. Performance In The Expenditure Area In Budget Realization Report (LRA) of Regency of Kuantan Singingi when seen from expense efficiency hence have either due expense mean of year 2015 until 2019 experiencing of thrift of expense.

Keyword: Performance Expenditure, Realize Budget Report

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	8
2.2 Hasil Penelitian Relevan	33
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Analisis Data	38

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Dekripsi Objek Penelitian	40
4.2	Hasil Penelitian	65
4.3	Pembahasan	87
BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	93
5.2	Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 sampai 2019	4
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	42
Tabel 4.2	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019 ...	69
Tabel 4.3	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Oparasi Tahun 2015 – 2019	73
Tabel 4.4	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Modal Tahun 2015 – 2019	76
Tabel 4.5	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Langsung Tahun 2015 – 2019	79
Tabel 4.6	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 – 2019	83
Tabel 4.7	Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 – 2019	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	47

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 |
| Lampiran 2 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 |
| Lampiran 3 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 |
| Lampiran 4 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 |
| Lampiran 5 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 |
| Lampiran 6 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 |

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN
REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

disusun dan diajukan oleh :

**DARTIAN PRASETYO
150412114**

telah diperiksa dan disetujui
oleh Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ZUL AMMAR, SE., ME
NIDN. 1020088401

RINA ANDRIANI, SE., M.SI
NIDN. 1003058501

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singgingi

YUL EMRI YULIS,SE.,M.SI
NIDN. 9910676786

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dartian Prasetyo

NPM : 150412114

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Dartian Prasetyo
NPM. 150412114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 oleh Pemerintah mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah. Selanjutnya, undang-undang ini digantikan dan disempurnakan dengan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian kedua Undang-Undang tersebut telah berubah menjadi akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (Kepada Pemerintah Pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang-Undang di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategis daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan strategis tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien nantinya akan dapat mewujudkan

pengolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa laporan sektor publik merupakan hasil representasi dari posisi keuangan begitu juga dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pada sektor publik, tujuannya adalah untuk memberikan dan juga menjelaskan mengenai informasi-informasi kepada informan guna untuk memberikan penjelasan mengenai arah dan juga posisi keuangan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan sebagai bentuk penyajian mengenai informasi keuangan suatu entitas sektor publik yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang di publikasikan pemerintah sebagai bentuk transparansi daerah akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dilihat dari segi kududukannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini mempunyai peran yang sangat penting dibandingkan neraca karena adalanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini pada dasarnya menyajikan antar anggaran dan juga realisasi dalam satu periode dalam suatu laporan keuangan entitas sektor publik. Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) juga adalah jenis laporan keuangan yang paling pertama dihasilkan sebelum membuat atau menyusun Laporan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Unsur-Unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berupa pendapat, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Dengan adanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) nantinya akan berguna bagi atau para pembaca laporan keuangan dalam membuat analisis kinerja pada laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Salah satu unsur yang terdapat dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah belanja yang secara definitif berarti semua pengeluaran yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Masalah yang sering terjadi dalam kajian sisi belanja adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Oleh karena penyerapan anggaran yang kurang, maka akan menimbulkan masalah-masalah lain dalam hal kinerja belanja seperti semakin menurunnya pertumbuhan belanja, efisiensi yang semakin menurun dan juga tidak serasi antar belanja modal dan operasional.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi, bahwa anggaran maupun belanja tidak langsung dari tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu mengalami peningkatan namun belum teralisasi sepenuhnya. Berikut laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi tahun 2016 sampai 2019 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 sampai 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pendapatan	1.243.418.595.297,22	1.226.968.996.024,56	1.352.463.719.411,33	1.379.036.049.030,34	1.520.385.895.407,34
2.	Belanja	1.405.457.090.259,80	1.125.604.448.499,00	1.101.404.863.220,56	1.093.477.719.930,11	1.284.933.325.956,36
3.	Transfer	96.996.230.860,00	162.448.171.859,00	259.624.877.669,00	250.641.062.770,00	266.287.970.211,00
4.	Surplus/ Defisit	(259.034.725.822,58)	(61.083.624.333,44)	(8.566.021.478,23)	34.917.266.330,23	(30.835.400.760,02)
5.	Pembiayaan	349.715.785.057,75	90.869.471.235,17	29.785.846.901,73	21.219.825.423,50	56.137.091.753,73
6.	Sisa Lebih Pembiayaan	90.681.059.235,17	29.785.846.901,73	21.219.825.423,50	56.137.091.753,73	53.301.690.993,71

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Merujuk kepada peraturan kementerian keuangan Nomor 258/PMK.02/2015 tentang tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksana anggaran belanja kementerian Negara/ Lembaga, dengan demikian kementerian Negara/Lembaga dituntut secara dah dan formal untuk fokus pada pelaksanaan realisasi anggarannya, jika tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi jika penyerapan anggaran yang ada tidak mencapai presentase yang ditetapkan yaitu sebesar 95% yaitu berupa pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) tentang analisis kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015 membuktikan bahwa varians belanja daerah relative baik, pertumbuhan belanja positif dan keserasian belanja relatif baik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2018) tentang analisis kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo membuktikan bahwa persentase selisih anggaran dengan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan belanja tidak terlalu tinggi, meningkatnya pembangunan daerah dan penghematan tidak mengurangi porsi belanja. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Naima (2017) tentang analisis kinerja anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo TA. 2011-2015 membuktikan bahwa analisis varian pendapatan dapat dikategorikan baik, pertumbuhan positif, derajat desentralisasi kurang naik, rasio efektivitas sangat efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Kas (LRA) dengan melakukan penelitian tentang kinerja belanja daerah dengan menggunakan rasio kinerja belanja daerah, oleh karena itu peneliti mengambil judul **Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio pertumbuhan belanja tahun 2015 - 2019?
2. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio keserasian belanja tahun 2015 - 2019?
3. Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2015 - 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio pertumbuhan belanja tahun 2015 - 2019.

2. Untuk Mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio keserasian belanja tahun 2015 - 2019.
3. Untuk Mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2015 - 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, diharapkan dapat membawa wawasan ilmiah, pengetahuan tentang kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bagi pimpinan instansi/ OPD, sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah dengan topik yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian di atas menegaskan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang berarti memiliki *input* dan *output*. Dari pengertian di atas pula kita dapat mengetahui bahwa input dari akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercermin dalam bukti transaksi pada suatu entitas yang mengalami proses pengidentifikasi, mengukur, dan mencatat yang menghasilkan *output* berupa laporan keuangan. Entitas disini menunjuk pada sebuah organisasi seperti perusahaan, pemerintah (pusat dan daerah) dan sebagainya. *Output* dari akuntansi adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomis (Halim dan Kusufi, 2012: 12).

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* (1970) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan.

Selanjutnya pengertian akuntansi menurut Soemarso (2012: 3), Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi dengan membuat perencanaan yang efektif dan efisien, melalui proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 16), akuntansi daerah adalah proses akuntansi termasuk didalamnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas/instansi pemerintah daerah (pemda) seperti kabupaten, kota ataupun provinsi) yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak internal ataupun eksternal.

Menurut peraturan menteri dalam nergeri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3), sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Akuntansi keuangan daerah menurut Suryani (2010: 8) adalah proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan menurut Gade (2010: 32), akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan Badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Akuntansi pemerintahan yang juga dikenal dengan akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai system informasi yang mengidentifikasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan entitas sektor publik. Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan (Soemarso, 2012: 9):

1. Alokasi sumber daya ekonomi
2. Pelayanan publik
3. Kinerja organisasi sektor publik
4. Penilaian kemampuan likuiditas
5. Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Pengguna eksternal dari laporan keuangan pemerintah pusat/daerah sebagaimana disebutkan dalam Halim dan Kusufi (2012) adalah DPR/DPRD, BPK, investor, kreditur, donatur, analis ekonomi dan akademisi, rakyat, LSM, Pemerintah pusat (pemerintah daerah), dan yang lainnya. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu *entitas* pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Laporan Keuangan pemerintah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pada dasarnya, sistem akuntansi dibagi menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Begitu pula di sektor publik yang dibagi menjadi akuntansi keuangan sektor publik dan akuntansi manajemen sektor publik. Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2012: 24) menjelaskan bahwa ruang lingkup akuntansi keuangan sektor publik meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisisan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

- Masisi dalam Glynn: 1993 sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2012: 14) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:
1. Identifikasi kegiatan yang relevan
 2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat
 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas
 4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah di suatu Negara tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Tujuan akuntansi pemerintah menurut Halim dan Kusufi (2012: 38):

1. Pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Gede (2010: 28), tujuan akuntansi pemerintahan daerah adalah:

1. Menjaga aset pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktik akuntansi yang diterima umum.
2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah daerah, baik secara daerah maupun isntansi yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Menyesiakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah daerah secara keseluruhan.
4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ratna (2010: 41) menuliskan bahwa ciri-ciri dari sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara.
2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel
3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan (DS) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja.
4. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu *copy* dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu *copy* untuk arsip unit perhitungan.
6. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode (Muyadi, 2010: 15).

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012: 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya menurut Badrudin (2012: 97), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012: 103), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim dan Kusufi (2012: 22) adalah

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mardiasmo (2009:21) realisasi adalah proses menjadikannya, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Menurut Nordiawan (2010:115) Realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja

pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pемbiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode tahunan.

Menurut Nordiawan (2010:48), anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/biaya), dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2009:78), Anggaran adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Menurut Rudianto (2009:3) anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Menurut M. Nafarin (2012:15) anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang. Menurut Nurulan

(2018:92) Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian.
2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang.
3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.
4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat dipenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

Menurut Prasetya (2010:6) menjelaskan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketakutan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah,

yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2009;21), terdiri dari:

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas Pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah Semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke Pemerintah.
4. Belanja (Basis Akrual) adalah Kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

6. Pembiayaan (*financing*) adalah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi
3. Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dicatatan atas laporan keuangan.

1. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Daerah dalam bentuk peningkatan aktiva dan penurunan utang dari berbagai sumber periode tahun Anggaran bersangkutan. Seperti halnya Akuntansi perusahaan, Akuntansi Pemerintahan mempunyai pendapatan dalam melakukan kegiatan keuangannya, dan pendapatan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah (pendapatan diakui dan dicatat menggunakan basis kas). Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelapor lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahan pusat dan daerah.

Dari uraian diaas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan adalah pengakuan pendapatan daerah didasarkan atas basis kas (*cash basis*) yaitu kas dicatat disebelah debet pada pendapatan disebelah kredit, dan selama tahun anggaran berjalan setiap aliran kas masuk yang malalui kas daerah dicatat pada saat penerimaan kas tersebut.

2. Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Khususnya pengeluaran melalui Bendahara pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Menurut komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang merupakan komite yang dibentuk oleh departemen keuangan RI, untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan. (2009;8) menyatakan bahwa:"Belanja diklasifikasikan menurut kasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. "Klasifikasi menurut ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga". "Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) seperti belanja operasi yang meliputi: Belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial. Selain itu, terdapat pula belanja modal yang meliputi: belanja asset tetap, belanja asset lainnya, belanja lain-lain/tak terduga."

Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran, Klasifikasi menuut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian Negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintahan daerah antara lain belanja sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas pemerintahan, dan lembaga teknis daerah."

3. Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah lebih antara pendapatan dan belanja satu periode pelaporan sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus ini dapat digunakan untuk

pembayaran pokok pinjaman kepada entitas lain, pemberian pinjaman kepada perusahaan Daerah atau dikembalikan ke kas daerah untuk pembiayaan anggaran tahun berikutnya dan lain-lain. Defisit biasa ditutupi dengan penggunaan SILPA, pencairan dan cadangan, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan Daerah, dan lain lain.

4. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintahan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Daerah (menggunakan basis kas mum).

5. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dari rekening kas umum Daerah (menggunakan basis kas umum).

6. Akuntansi Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerima pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

7. Akuntansi Sisa Lebih Kurang/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun periode

pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realsisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos (SiLPA/SiKPA)

Menurut peraturan Bupati dalam bukunya berjudul sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgingi (2009;6) menyatakan bahwa:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan perlu dibayar oleh Pemerintah serta Pemerintah daerah yang diakui sebagai penerimaan nilai kekayaan bersih, pendapatan terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

b. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

c. Pendapatan Retribusi pajak adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi.

d. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari kekayaan daerah.

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sahadalah pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

f. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dan perimbangan dari pemerintah pusat dan dari pemerintahan provinsi.

1) Dana dari pusat antara lain :

- a) Dana bagi hasil pajak
- b) Dana bagi hasil sumber daya alam
- c) Dana alokasi umum
- d) Dana alokasi khusus

2) Dana perimbangan dari pemerintah pusat lainnya terdiri dari:

- a) Dana otonomi daerah khusus
 - b) Dana penyesuaian
-
- a) Pendapatan bagi hasil
 - b) Pendapatan bagi hasil lainnya.

g. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang diperoleh dari dana

bantuan kontijensi, dan darurat dan dana bantuan Provinsi.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja operasi terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- 3) Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal terdiri dari:

- 1) Belanja tanah.
- 2) Belanja peralatan dan mesin.
- 3) Belanja gedung dan bangunan.
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.
- 5) Belanja asset tetap lainnya.

c. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tak bias dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Transfer terdiri dari:

a) Bagi hasil pajak. b)

Bagi hasil retribusi.

c) Bagi hasil Pendapatan lainnya

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

5. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan Negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

- a. Penggunaan Silpa.
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah rekening kas umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga penyertaan modal. Pemerintahan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. Silpa Tahun Berjalan.
- b. Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- d. Pembayaran Pokok Pinjaman.
- e. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga.

Tujuan Standar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah menetapkan dasar-dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketertiban entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/APBD)
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.1.5 Analisis Belanja Daerah

Mahmudi (2016:154) menyatakan bahwa analisis belanja daerah sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*). Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah

daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dibuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Pertumbuhan Belanja $T_{ht} =$

$$\frac{h_t - h_{t-1}}{h_{t-1}} \times 100\%$$

2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (*recurrent*).

Rasio Belanja Operasi $=$

$$\frac{h_t - h_{t-1}}{h_{t-1}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, belanja modal juga bersifat rutin. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.

Rasio Belanja Modal = $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$

c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary*). Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung adalah merupakan pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Rasio Belanja Langsung = $\frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$

Rasio Belanja Tidak Langsung = $\frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Rasio Efisiensi Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

2.2 Hasil Pelitian Relevan

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

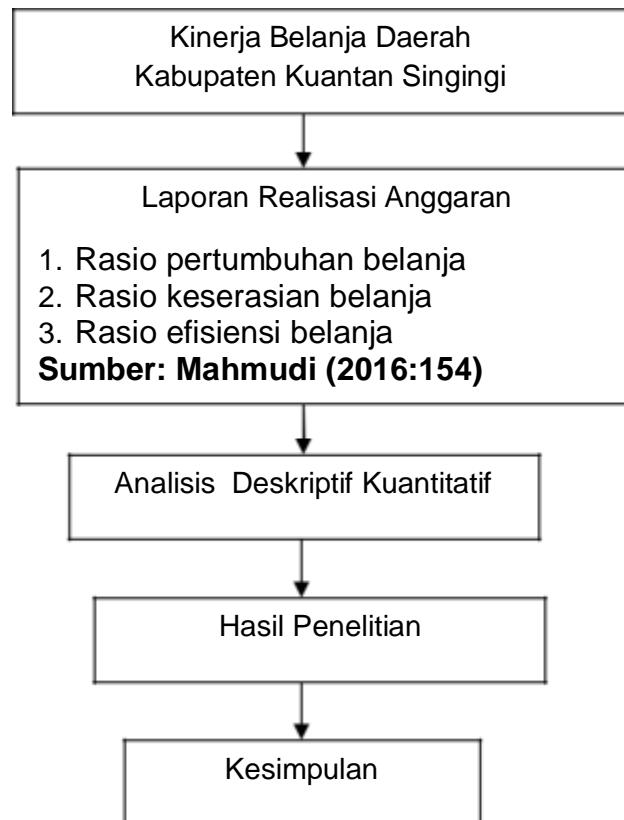
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Harry (2015)	Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dari varians belanja menunjukkan kinerja yang baik. 2. Dari pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan. 3. Dari perhitungan rasio efisiensi dapat melakukan pengehematan sebesar 12,73% dan 14,06%.
2	Rusita (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam Belanja Langsung tingkat efisien sudah efisien. 2. Pencapaian Belanja Langsung sudah dalam tingkat efektif
3.	Ingriani (2016)	Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kinerja belanja baik. 2. Pertumbuhan belanja belum seimbang. 3. Efektivitas, efisiensi dan produktivitas belanja belum optimal.
4.	Runik (2016)	Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengalami penurunan kinerja sebesar 61,02% 2. PAD sudah efektif\Kering terjadi kesalahan Pencatatan 3. Belanja mengalami penghematan.
5.	Putri (2017)	Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Varians belanja daerah relative baik. 2. Pertumbuhan belanja positif. 3. Keserasian belanja relative baik.
6.	Naima (2017)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Kesesuaian Penyajian Laporan terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo TA.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis varian pendapatan dapat dikategorikan baik, pertumbuhan positif, derajat desentralisasi kurang naik, rasio efektivitas sangat efektif. 2. Analisis varian belanja baik, keserasian belanja sangat serasi, belanja modal tidak serasi, efisiensi cukup efisien, pengajian

		2011-2015	LRA terdapat 14 paragraf uang sesuai dan 3 tidak sesuai dengan PSAP 02.
7.	Reza (2017)	Analisis Keuangan Daerah di Tinjau dari Rasio Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian rata-rata 14,63%. 2. Rasio efektivitas sudah efektif rata-rata 120,03%. 3. Rasio efisiensi rata-rata 1,16%. 4. Rasio keserasian masih diperioritaskan benlanja operasi.
8.	Rukaya (2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio efektivitas rata-rata sebesar 102%. 2. Rasio Efisiensi rata-rata sebesar 92%
9.	Jalaludi (2018)	Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Tahun 2015-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja belanja berdasarkan rasio pertumbuhan baik. 2. Kinerja belanja berdasarkan rasio keselarasan wajar. 3. Kinerja belanja berdasarkan rasio efisiensi masih dikategorikan cukup efisien.
10.	Hasanah (2018)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase selisih anggaran dengan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya. 2. Pertumbuhan belanja tidak terlalu tinggi. 3. Meningkatnya pembangunan daerah 4. Penghematan tidak mengurangi porsi belanja.

Sumber: Review Penelitian Terdahulu, 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Mahmudi (2016:154)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kuantitatif dengan desain penelitian kausal. Deskriptif merupakan salah satu bentuk Metode Penelitian yang berfungsi untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *Setting Sosial* atau untuk *Eksplorasi* dan *Klarifikasi*, yang terbentuk dengan cara Mendeskripsikan suatu Fenomena peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia (Sukmadinata, 2013: 34). Menurut Sugiyono (2008: 8), kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran yang kokoh dengan menggunakan rumus matematis. Maka desain penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Sinambek Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singgingi. Penelitian dilakukan mulai dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan Juli 2020.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu															
		Oktober 2019				April 2020				Mei 2020				Juni 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan data dan Penyusunan Proposal																
2	Seminar Proposal																
3	Penelitian Lapangan																
4	Pengolahan dan Analisa Data																
5	Konsultasi Pembimbing																
6	Ujian Skripsi																
7	Revisi Skripsi																
8	ACC Skripsi																

Catatan: Jadwal Penelitian sewaktu-waktu dapat berubah

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar 2011: 42).

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan yang berhubungan dengan Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2015-2019.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2013: 274).

Metode dokumentasi akan digunakan untuk mencari data kuantitatif yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi

3.4.2 Kepustakaan

Adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi kajian pustaka dalam sebuah penelitian (Pasalong 2012: 137).

Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori tentang Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi.

3.5 Analisis Data

Metode analisa data untuk mengetahui kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi menggunakan rumus Analisa Rasio yaitu:

1. Analisa Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja } Th = \frac{h - h - 1}{h - 1} \times 100\%$$

Ket: Ideal Pertumbuhan belanja mengalami kenaikan setiap tahun.

2. Analisa Keserasian Belanja

a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{h}{h} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{h}{h} \times 100\%$$

c. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Lansung

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{h}{h} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Belanja Tidak Langsung}}{\text{Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Ket: Keserasian belanja terjadi bila belanja modal lebih besar dari belanja operasional atau belanja langsung besar dari belanja tidak langsung.

3. Analisa Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Belanja Realisasi}}{\text{Belanja Diketahui}} \times 100\%$$

Ket: efisiensi belanja terjadi bila berealisasi belanja di bawah 100%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singgingi

Kabupaten Kuantan Singgingi sebagai daerah otonom adalah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembar Negara tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968), dengan Ibukota Teluk Kuantan.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singgingi 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singgingi adalah:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi.

Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singgingi terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Cerenti
2. Kecamatan Inuman
3. Kecamatan Kuantan Hilir

4. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
5. Kecamatan Pangean
6. Kecamatan Logas Tanah Darat
7. Kecamatan Benai
8. Kecamatan Sentajo Raya
9. Kecamatan Kuantan Tengah
10. Kecamatan Gunung Toar
11. Kecamatan Kuantan Mudik
12. Kecamatan Hulu Kuantan
13. Kecamatan Pucuk Rantau
14. Kecamatan Singingi
15. Kecamatan Singingi Hilir

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 18 Dinas, 5 Badan, 3 Kantor dan 15 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18	Dinas Pertanian
19	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	Badan Pendapatan Daerah
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Inspektorat
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat DPRD
27	Kantor Camat Cerenti
28	Kantor Camat Kuantan Hilir
29	Kantor Camat Benai
30	Kantor Camat Kuantan Tengah
31	Kantor Camat Kuantan Mudik
32	Kantor Camat Singingi
33	Kantor Camat Inuman
34	Kantor Camat Pangean
35	Kantor Camat Logas Tanah Darat

Lanjutan Tabel 4.1

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
36	Kantor Camat Gunung Toar
37	Kantor Camat Hulu Kuantan
38	Kantor Camat Singingi Hilir
39	Kantor Camat Sentajo Raya
40	Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang
41	Kantor Camat Pucuk Rantau

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2019

4.1.2. Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran pencapaian dimasa depan melalui misi pilihan (Mulyadi, 2010:11). Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tenram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

4.1.2.2 Misi

Misi merupakan suatu pernyataan yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi dalam mencapai masa depan (Mulyadi, 2010:11).

- Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah:
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
 4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
 6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

4.1.3. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terlihat bahwa beban kerja bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah cukup luas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, fasilitasi, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring, evaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk lembaga pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

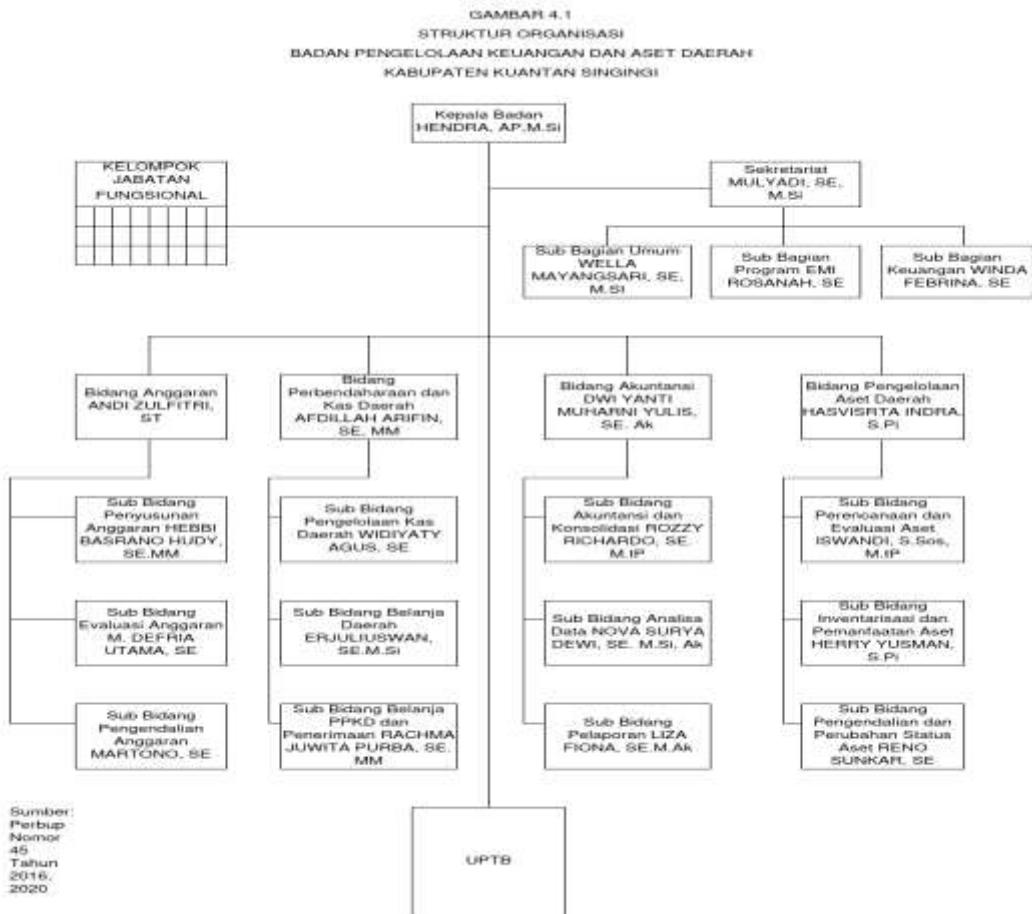
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah **“Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.
3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan di bidang Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Belanja Daerah;
 - c. Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan.
 5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi;
 - b. Sub Bidang Analisa Data;
 - c. Sub Bidang Pelaporan.
 6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset;
 - b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset.



Sumber: Data Olahan, 2020

Penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pengkoordinasian dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan fasilitas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- g. Pengawasan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- h. Pengendalian dan monitoring dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan data.
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan.

- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan.
- e. Pembinaan kepegawaian.
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana.
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga.
- h. Penyelenggaraan perjalanan dinas.
- i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan.
- j. Penyelenggaraan keprotokoleran.
- k. Pengelolaan keuangan.
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum;

Sub Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan Bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokoleran. Kepala sub bagian umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan

- 2) Penyiapan bahan pembinaan sarana dan prasarana
 - 3) Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana
 - 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga
 - 5) Penyiapan bahan penyelenggaraan Perjalanan Dinas
 - 6) Penyiapan bahan penyelenggaraan Kehumasan
 - 7) Penyiapan bahan penyelenggaraan Keprotokolaran
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Program;
- Sub Bagian program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan Bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusutan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala sub bagian program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:
- 1) Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data
 - 3) Penyiapan bahan penyajian data
 - 4) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program
 - 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian program.
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan Bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusun dan pengkoordinasian rencana anggaran pengolahan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kepala sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran
- 2) Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan
- 3) Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
- 7) Penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian keuangan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran, membawahkan:

Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Anggaran. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran.

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang anggaran.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang anggaran.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang anggaran.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran, membawahkan:

- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penyusunan anggaran;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan penyusunan anggaran;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi penyusunan anggaran;

- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program penyusunan anggaran;
 - 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;
- Sub Bidang Evaluasi Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Evaluasi Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi anggaran;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran evaluasi anggaran;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi anggaran;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi anggaran;
 - 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan evaluasi anggaran;
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi anggaran;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program evaluasi anggaran;
 - 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

c. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengendalian anggaran;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian anggaran;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pengendalian anggaran;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengendalian anggaran;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengendalian anggaran;
- 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan:

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah;

Sub Bidang Pengelola Kas Daerah aran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Pengelola Kas Daerah mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Pengelola Kas Daerah Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelola kas daerah;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelola kas daerah;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelola kas daerah;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelola kas daerah;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pengelola kas daerah;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluas pengelola kas daerah;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengelola kas daerah;
- 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Sub Bidang Belanja Daerah;

Sub Bidang Belanja Daerah dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pealporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran.

Kepala Sub Bidang Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis belanja daerah;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran belanja daerah;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan belanja daerah;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan belanja daerah;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi p belanja daerah;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program belanja daerah;
- 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan.

Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasa, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyusunan anggaran. Kepala Sub Bidang Belanja PPKD dan Penerimaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluas Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Belanja PPKD dan Penerimaan;
- 8) Penyiapan bahan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang akuntansi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bidang yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi;

Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan konsolidasi;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran akuntansi dan konsolidasi;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis akuntansi dan konsolidasi;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan akuntansi dan konsolidasi;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan akuntansi dan konsolidasi;

- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi akuntansi dan konsolidasi;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program akuntansi dan konsolidasi;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Sub Bidang Analisa Data;
- Sub Bidang Analisa Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Analisa Data mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan analisa data. Kepala Sub Bidang Analisa Data dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisa data;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran analisa data;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis analisa data;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan analisa data;
 - 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan analisa data;
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi analisa data.
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program analisa data;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelaporan. Kepala Sub Bidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pelaporan;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pelaporan;
- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan;
- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pelaporan;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaporan;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pelaporan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Aset Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset;

Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan evaluasi aset;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran evaluasi aset;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi aset;

- 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi aset;
 - 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan evaluasi aset;
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi aset;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program evaluasi aset;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
- Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset; mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan aset;

- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program inventarisasi dan pemanfaatan aset;
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset.
- Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan akuntansi dan konsolidasi. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan perubahan status aset;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengendalian dan perubahan status aset;
 - 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan perubahan status aset;
 - 4) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan perubahan status aset;

- 5) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan pengendalian dan perubahan status aset;
- 6) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pengendalian dan perubahan status aset;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pengendalian dan perubahan status aset;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.2 Hasil Penelitian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketataan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketataan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan inforrmasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat diketahui berdasarkan rasio pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Berikut pemjabaran kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi.

4.2.1 Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019

Analisis belanja daerah sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*). Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi.

Untuk mengetahui pertumbuhan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan Rumus sebagai Berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th} = \frac{h - h - 1}{h - 1} \times 100\% = \frac{h - h - 1}{h - 1} \times 100\%$$

Berikut pertumbuhan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2015

Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Realisasi Belanja Tahun 2014 sebesar Rp. 1.380.113.615.130,00

Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{h - 2015 - h - 2014}{h - 2014} \times 100\% = \frac{1.405.457.090.259,80 - 1.380.113.615.130,00}{1.380.113.615.130,00} \times 100\% = \frac{25.343.475.129,80}{1.380.113.615.130,00} \times 100\% = 1,84\%$$

2. Tahun 2016

Realisasi Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Pertumbuhan Belanja Tahun 2016 adalah sebesar

$$= \frac{h - 2016 - h - 2015}{h - 2015} \times 100\% = \frac{1.125.604.448.499,00 - 1.405.457.090.259,80}{1.405.457.090.259,80} \times 100\% = -19,04\%$$

$$= \frac{-279.852.641.760,80}{1.405.457.090.259,80} \times 100\%$$

$$= 19,91\%$$

3. Tahun 2017

Realisasi Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56
 Realisasi Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.604.448.499,00

Pertumbuhan Belanja Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{1.101.404.863.220,56 - 1.125.604.448.499,00}{1.125.604.448.499,00} \times 100\%$$

$$= -2,15\%$$

4. Tahun 2018

Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11
 Realisasi Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56

Pertumbuhan Belanja Tahun 2018 adalah sebesar

$$= \frac{1.093.477.719.930,11 - 1.101.404.863.220,56}{1.101.404.863.220,56} \times 100\% = -0,72\%$$

5. Tahun 2019

Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.933.325.956,36 Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11

Pertumbuhan Belanja Tahun 2019 adalah sebesar

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1.284.933.325.956,36 - 1.093.477.719.930,11}{1.093.477.719.930,11} \times 100\% \\
 &= \frac{191.455.606.026,25}{1.093.477.719.930,11} \times 100\% \\
 &= 17,51\%
 \end{aligned}$$

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Th _t	Realisasi Belanja Th _{t-1}	Pertumbuhan Belanja Th _t
2015	1.405.457.090.259,80	1.380.113.615.130,00	1,84%
2016	1.125.604.448.499,00	1.405.457.090.259,80	- 19,91%
2017	1.101.404.863.220,56	1.125.604.448.499,00	- 2,15%
2018	1.093.477.719.930,11	1.101.404.863.220,56	- 0,72%
2019	1.284.933.325.956,36	1.093.477.719.930,11	17,51%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2015 kenaikan belanja dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.343.475.129,80 dengan pertumbuhan belanja sebesar 1,84%, belanja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 279.852.641.760,80 dari tahun 2015 dengan pertumbuhan belanja sebesar -19,91%, belanja tahun 2017 mengalami penurunan juga sebesar Rp. 24.199.585.278,44 dari tahun 2016 dengan pertumbuhan belanja sebesar -2,15%, belanja tahun 2018 mengalami penurunan juga sebesar Rp. 7.927.143.290,45 dari tahun 2016 dengan pertumbuhan belanja sebesar

-0,72% , sedangkan belanja tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp. 191.455.606.026,25 dengan pertumbuhan belanja sebesar 17,51%.

4.2.2 Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi berdasarkan rasio keserasian belanja tahun 2015 – 2019

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

1. Rasio Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (*recurrent*).

Untuk mengetahui rasio belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut keserasian belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio belanja operasi Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 sebesar Rp. 1.078.721.343.611,80

Total Belanja Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Rasio Belanja Operasi Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{1.078.721.343.611,80}{1.405.457.090.259,80} \times 100\% \quad h \quad h \quad 2015$$

$$= 76,75\%$$

b. Tahun 2016

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2016 sebesar Rp.

947.588.085.323,00 Total Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp.

1.125.604.448.499,00 Rasio Belanja Operasi Tahun 2016 adalah

sebesar

$$= \frac{947.588.085.323,00}{1.125.604.448.499,00} \times 100\% \quad h \quad h \quad 2016$$

$$= 84,18\%$$

c. Tahun 2017

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 sebesar Rp. 898.131.222.304,51

Total Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56

Rasio Belanja Operasi Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{898.131.222.304,51}{1.101.404.863.220,56} \times 100\% \quad h \quad h \quad 2017$$

$$= 81,54\%$$

d. Tahun 2018

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 sebesar Rp.

896.648.101.048,51 Total Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp.

1.093.477.719.930,11 Rasio Belanja Operasi Tahun 2018 adalah

sebesar

$$= \frac{h_{2018}}{h_{2019}} \times 100\% \\ = \frac{1.093.477.719.930,11}{896.648.101.048,51} \times 100\%$$

$$= 82\%$$

e. Tahun 2019

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp.

956.969.721.378,36 Total Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.

1.284.933.325.956,36 Rasio Belanja Operasi Tahun 2019 adalah
sebesar

$$= \frac{h_{2019}}{h_{2018}} \times 100\% \\ = \frac{1.284.933.325.956,36}{956.969.721.378,36} \times 100\%$$

$$= 74,48\%$$

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Oparasi Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Oparasi Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi
2015	1.078.721.343.611,80	1.405.457.090.259,80	76,75%
2016	947.588.085.323,00	1.125.604.448.499,00	84,18%
2017	898.131.222.304,51	1.101.404.863.220,56	81,54%

2018	896.648.101.048,51	1.093.477.719.930,11	82,00%
2019	956.969.721.378,36	1.284.933.325.956,36	74,48%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja operasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi dimana tahun 2015 realisasi belanja operasi sebesar Rp. 1.078.721.343.611, dengan rasio belanja operasi sebesar 76,75%. Tahun 2016, rasio belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 7,43% menjadi 84,18% namun realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp. 131.133.258.288,80 dari tahun 2015 menjadi Rp. 947.588.085.323,00. Tahun 2017, rasio belanja operasi mengalami penurunan sebesar 2,64% menjadi 81,54% namun realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp. 49.456.863.018,49 dari tahun 2016 menjadi Rp. 898.131.222.304,51. Tahun 2018, rasio belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 0,46% menjadi 82,00% namun realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp. 1.483.121.256,00 dari tahun 2017 menjadi Rp. 896.648.101.048,51. Tahun 2019, rasio belanja operasi mengalami penurunan sebesar 7,52% menjadi 74,48% namun realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 60.321.620.329,85 dari tahun 2018 menjadi Rp. 60.321.620.329,85.

2. Rasio Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, belanja modal juga bersifat rutin. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.

Untuk mengetahui rasio belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut keserasian belanja I dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Realisasi Belanja Modal Tahun 2015 sebesar Rp. 326.735.746.648,00

~~Total Belanja Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80~~

Rasio Belanja Modal Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{326.735.746.648,00}{1.405.457.090.259,80} \times 100\% = 23,25\%$$

b. Tahun 2016

Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 sebesar Rp. 178.016.363.176,00

~~Total Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.604.448.499,00~~

Rasio Belanja Modal Tahun 2016 adalah sebesar

$$= \frac{178.016.363.176,00}{1.125.604.448.499,00} \times 100\% = 15,82\% \text{ c.}$$

Tahun 2017

Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp. 203.273.640.916,05

Total Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56

Rasio Belanja Modal Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{h_{2017} \times 100\%}{h_{2017}} \\ = \frac{203.273.640.916,05}{1.101.404.863.220,56} \times 100\%$$

= 18,45%

d. Tahun 2018

Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 196.801.855.381,60

Total Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11

Rasio Belanja Modal Tahun 2018 adalah sebesar

$$= \frac{h_{2018} \times 100\%}{h_{2018}} \\ = \frac{196.801.855.381,60}{1.093.477.719.930,11} \times 100\%$$

= 18,00%

e. Tahun 2019

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp. 327.963.604.578,00

Total Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.933.325.956,36

Rasio Belanja Modal Tahun 2019 adalah sebesar

$$= \frac{h_{2019} \times 100\%}{h_{2019}} \\ = \frac{327.963.604.578,00}{1.284.933.325.956,36} \times 100\%$$

= 25,52%

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Modal Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Modal Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal
2015	326.735.746.648,00	1.405.457.090.259,80	23,25%
2016	178.016.363.176,00	1.125.604.448.499,00	15,82%
2017	203.273.640.916,05	1.101.404.863.220,56	18,45%
2018	196.801.855.381,60	1.093.477.719.930,11	18,00 %
2019	327.963.604.578,00	1.284.933.325.956,36	25,52%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja modal dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi cukup signifikan dimana tahun 2015 realisasi belanja modal sebesar Rp. 326.735.746.648,00 dengan rasio belanja modal sebesar 23,25%. Tahun 2016, rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar 7,43% menjadi 15,82% namun realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 148.719.383.472,00 dari tahun 2015 menjadi Rp. 178.016.363.176,00. Tahun 2017, rasio belanja modal mengalami kenaikan sebesar 65,73% menjadi 81,54% dan realisasi belanja modal juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.257.277.740,05 dari tahun 2016 menjadi Rp. 203.273.640.916,05. Tahun 2018, rasio belanja modal mengalami penurunan sebesar 63,55% menjadi 18,00% namun realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 6.471.785.534,45 dari tahun 2017 menjadi Rp. 196.801.855.381,60. Tahun 2019, rasio belanja modal mengalami kenaikan sebesar 7,53% menjadi 25,52% dan realisasi

belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 131.161.749.196,40 dari tahun 2018 menjadi Rp. 327.963.604.578,00.

3. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Lansung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary*). Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas).

Untuk mengetahui rasio belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut keserasian belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Langsung Belanja Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 770.689.136.396,80

Total Belanja Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Rasio Belanja Langsung Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{770.689.136.396,80}{1.405.457.090.259,80} \times 100\% = 54,84\%$$

b. Tahun 2016

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp. 545.282.923.749,00

Total Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.604.448.499,00

Rasio Belanja Langsung Tahun 2016 adalah sebesar

$$= \frac{h \text{ 2016} \times 100\%}{h \text{ 2016}} \\ = \frac{1.125.604.448.499,00}{545.282.923.749,00} \times 100\%$$

= 48,44%

c. Tahun 2017

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 sebesar Rp. 497.810.046.161,56

Total Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56

Rasio Belanja Langsung Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{h \text{ 2017} \times 100\%}{h \text{ 2017}} \\ = \frac{497.810.046.161,56}{1.101.404.863.220,56} \times 100\%$$

= 45,20%

d. Tahun 2018

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp. 491.183.455.993,11

Total Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11

Rasio Belanja Langsung Tahun 2018 adalah sebesar

$$= \frac{h \text{ 2018} \times 100\%}{h \text{ 2018}} \\ = \frac{491.183.455.993,11}{1.093.477.719.930,11} \times 100\%$$

= 44,92%

e. Tahun 2019

Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 sebesar Rp. 635.856.310.419,36

Total Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.933.325.956,36

Rasio Belanja Langsung Tahun 2019 adalah sebesar

$$= \frac{635.856.310.419,36}{1.284.933.325.956,36} \times 100\% \quad h \quad 2019 \times 100\% \quad h \quad h \quad 2019$$

$$= 48,92\%$$

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Langsung Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Rasio Belanja Langsung Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Langsung
2015	770.689.136.396,80	1.405.457.090.259,80	54,84%
2016	545.282.923.749,00	1.125.604.448.499,00	48,44%
2017	497.810.046.161,56	1.101.404.863.220,56	45,20%
2018	491.183.455.993,11	1.093.477.719.930,11	44,92%
2019	635.856.310.419,36	1.284.933.325.956,36	49,49%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja langsung dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dimana tahun 2015 realisasi belanja langsung sebesar Rp. 770.689.136.396,80 dengan rasio belanja langsung sebesar 54,84%. Tahun 2016, rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 6,39% menjadi 48,44% dan realisasi belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp. 225.406.212.647,80 dari tahun 2015 menjadi Rp. 545.282.923.749,00. Tahun 2017, rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 3,25% menjadi 45,20% dan realisasi belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp. 47.472.877.587,44 dari tahun 2016 menjadi Rp.

497.810.046.161,56. Tahun 2018, rasio belanja langsung mengalami penurunan sebesar 0,28% menjadi 18,00% namun realisasi belanja langsung mengalami penurunan sebesar Rp. 6.626.590.168,45 dari tahun 2017 menjadi Rp. 491.183.455.993,11. Tahun 2019, rasio belanja langsung mengalami kenaikan sebesar 4,57% menjadi 49,49% dan realisasi belanja langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 144.672.854.426,25 dari tahun 2018 menjadi Rp. 635.856.310.419,36.

Belanja tidak langsung adalah merupakan pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Untuk mengetahui rasio belanja tidak langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berikut keserasian belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 731.764.184.723,00

Total Belanja Daerah Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{731.764.184.723,00}{1.405.457.090.259,80} \times 100\%$$

$$= \frac{731.764.184.723,00}{1.405.457.090.259,80} \times 100\%$$

$$= 52,07\%$$

b. Tahun 2016

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 sebesar

Rp. 742.769.696.609,00

~~Total Belanja Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.604.448.499,00~~

Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 adalah sebesar

$$= \frac{742.769.696.609,00}{1.125.604.448.499,00} \times 100\% \quad h \quad 2016 \times 100\% \quad h \quad h \quad 2016$$

= 65,99% c.

Tahun 2017

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebesar

Rp. 863.219.694.728,00

~~Total Belanja Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56~~

Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{863.219.694.728,00}{1.101.404.863.220,56} \times 100\% \quad h \quad 2017 \times 100\% \quad h \quad h \quad 2017$$

= 78,37%

d. Tahun 2018

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar

Rp. 582.935.326.707,00

Total Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11

Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 adalah sebesar

$$= \frac{h \text{ } 2018 \times 100\%}{h \text{ } h \text{ } 2018}$$

= 502.935.326.707,00 x 100%
1.091.477.716.911,11

$$= 53,31\%$$

e. Tahun 2019

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar
Rp. 915.364.985.748,00

Total Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.933.325.956,36

Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 adalah sebesar

$$= \frac{h \text{ } 2019 \times 100\%}{h \text{ } h \text{ } 2019}$$

= 915.364.985.748,00 x 100%
1.284.933.325.956,36

$$= 71,24\%$$

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Tidak
----------------	----------------------------------	----------------------	---------------------

			Langsung
2015	731.764.184.723,00	1.405.457.090.259,80	52,07%
2016	742.769.696.609,00	1.125.604.448.499,00	65,99%
2017	863.219.694.728,00	1.101.404.863.220,56	78,37%
2018	582.935.326.707,00	1.093.477.719.930,11	53,31%
2019	915.364.985.748,00	1.284.933.325.956,36	71,24%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio belanja tidak langsung dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cenderung naik dimana tahun 2015 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 731.764.184.723,00 dengan rasio belanja tidak langsung sebesar 52,07%. Tahun 2016, rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 13,92% menjadi 65,99% dan realisasi belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.005.511.886,00 dari tahun 2015 menjadi Rp. 742.769.696.609,00. Tahun 2017, rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 12,39% menjadi 78,37% dan realisasi belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 120.449.998.119,00 dari tahun 2016 menjadi Rp. 863.219.694.728,00. Tahun 2018, rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 25,06% menjadi 78,37% dan realisasi belanja tidak langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp. 280.284.368.021,00 dari tahun 2017 menjadi Rp. 582.935.326.707,00. Tahun 2019, rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 17,93% menjadi 71,24% dan realisasi belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 332.429.659.041,00 dari tahun 2018 menjadi Rp. 915.364.985.748,00.

4.2.3 Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2015 – 2018

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Untuk mengetahui rasio efisiensi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berikut kinera belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio efisiensi belanja Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2015

Realisasi Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 1.405.457.090.259,80

Anggaran Belanja Tahun 2015 sebesar Rp. 1.585.886.765.414,00

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2015 adalah sebesar

$$= \frac{1.405.457.090.259,80}{1.585.886.765.414,00} \times 100\%$$

$$= 88,62\%$$

b. Tahun 2016

Realisasi Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 1.125.604.448.499,00

Anggaran Belanja Tahun 2016 sebesar Rp. 1.413.155.896.952,00

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2016 adalah sebesar

$$= \frac{1.125.604.448.499,00}{1.413.155.896.952,00} \times 100\% \\ = 79,65\%$$

c. Tahun 2017

Realisasi Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 1.101.404.863.220,56

Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp. 1.215.076.587.177,73

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2017 adalah sebesar

$$= \frac{1.101.404.863.220,56}{1.215.076.587.177,73} \times 100\% \\ = 90,64\%$$

d. Tahun 2018

Realisasi Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 1.093.477.719.930,11

Anggaran Belanja Tahun 2018 sebesar Rp. 1.181.683.178.436,12

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2018 adalah sebesar

$$= \frac{1.093.477.719.930,11}{1.181.683.178.436,12} \times 100\% \\ = 92,54\%$$

e. Tahun 2019

Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 1.284.933.325.956,36

Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 1.188.483.099.480,40

Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019 adalah sebesar

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{A - 2019}}{\text{R - 2019}} \times 100\% \\
 & = \frac{1.188.483.099.480,40}{1.284.933.325.956,36} \times 100\% \\
 & = 108,12\%
 \end{aligned}$$

Berikut Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2015 – 2019 pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2015 – 2019

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Rasio Efisiensi
2015	1.585.886.765.414,00	1.405.457.090.259,80	88,62
2016	1.413.155.896.952,00	1.125.604.448.499,00	79,65
2017	1.215.076.587.177,73	1.101.404.863.220,56	90,64
2018	1.181.683.178.436,12	1.093.477.719.930,11	92,54
2019	1.188.483.099.480,40	1.284.933.325.956,36	108,12

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi belanja dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cenderung naik dimana tahun 2015 realisasi belanja sebesar Rp. 1.585.886.765.414,00 dan Rp. 1.405.457.090.259,80 yang tidak terealisasi dengan rasio efisiensi belanja sebesar 88,62%. Tahun 2016, rasio efisiensi belanja mengalami penurunan sebesar 8,97% menjadi 79,65% dengan realisasi belanja Rp. 1.413.155.896.952,00 dan Rp. 1.125.604.448.499,00 yang tidak terealisasi. Tahun 2017 rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan sebesar 1,07% menjadi 90,64% dengan realisasi belanja Rp. 1.215.076.587.177,73 dan Rp. 1.101.404.863.220,56 yang tidak terealisasi. Tahun 2018 rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan sebesar 2,00% menjadi 92,54% dengan realisasi belanja Rp. 1.181.683.178.436,12 dan Rp. 1.093.477.719.930,11 yang tidak terealisasi. Tahun 2019 rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan sebesar 1,62% menjadi 108,12% dengan realisasi belanja Rp. 1.188.483.099.480,40 dan Rp. 1.284.933.325.956,36 yang tidak terealisasi.

Tahun 2017, rasio efisiensi belanja mengalami kenaikan sebesar 10,99% menjadi 90,64% dengan realisasi belanja Rp. 1.215.076.587.177,73 dan Rp. 113.671.723.957,17 yang tidak terealisasi. Tahun 2018, rasio efisiensi belanja mengalami kenaikan sebesar 1,89% menjadi 92,54% dengan realisasi belanja Rp. 1.181.683.178.436,12 dan Rp. 88.205.458.506,01 yang tidak terealisasi. Tahun 2019, rasio efisiensi belanja mengalami kenaikan sebesar 15,58% menjadi 108,12% dengan realisasi belanja Rp. 1.188.483.099.480,40 dan Rp. 96.450.226.475,96 melampaui anggaran.

4.3 Pembahasan

1. Analisa Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dapat dilihat dari selisih realisasi belanja tahun sekarang dengan realisasi belanja tahun sebelumnya di bagi dengan realisasi belanja tahun sebelumnya di kalikan 100%.

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Belanja daerah sendiri memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Dari hasil penelitian dapat dihati bahwa pertumbuhan belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kecenderungan menurun dimana tahun 2016 hingga tahun 2018 pertumbuhan belanja mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan yang mengalami kenaikan pada tahun

2015 dan 2019. Kondisi belanja yang mengalami kecenderungan menurun menandakan kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya belanja daerah sendiri memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

Menurut Mahmudi (2016:154), Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Menurunnya kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh tidak stabilnya penggaran belanja dimana belanja tahun sebelumnya lebih tinggi dari belanja tahun sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Runik (2016) tentang Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dimana hasil penelitiannya adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan kinerja sebesar 61,02%.

Hal ini berarti kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari pertumbuhan belanja megalami kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya.

2. Analisa Keserasian Belanja

Analisa keserasian belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan total belanja.

Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya, pemerintah dengan pendapatan tinggi cenderung akan memiliki porsi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah. Penyebabnya adalah pemerintah daerah dengan pendapatan dengan tingkat pendapatan tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi sehingga pemerintah daerah tersebut cenderung melakukan belanja yang bersifat jangka pendek.

Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRAdapat dilihat dari keserasian belanja. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari keserasian belanja pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dari rasio belanja operasi mengalami fluktuasi dimana tahun 2017 dan 2019 rasionya menurun sedangkan tahun 2016 dan 2018 rasionya meningkat. Untuk rasio belanja modal mengalami fluktuasi juga dimana tahun 2017 dan 2019 rasionya meningkat sedangkan tahun 2016 dan 2018 rasionya menurun. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa belanja operasi dan belanja modal berbanding lurus dengan total belanja secara keseluruhan dimana saat total belanja turun maka belanja operasi dan belanja modal juga turun, begitu

juga sebaliknya, namun untuk belanja modal, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sehingga bertolak belakang dengan total belanja yang mengalami penurunan. Bila dilihat dari porsi besaran belanja maka porsi untuk belanja operasi lebih besar dari belanja modal, dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan belanja modal.

Bila dilihat dari belanja langsung dan tidak langsung maka rasio belanja langsung mengalami kecenderungan menurun dimana rasio belanja langsung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dan hanya tahun 2019 mengalami kenaikan. Bila di bandingkan dengan total belanja, belanja langsung berbanding lurus dengan total belanja secara keseluruhan dimana saat total belanja turun maka belanja langsung juga turun, begitu juga sebaliknya. Rasio belanja tidak langsung mengalami kecenderungan meningkat dimana rasio belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari tahun 2016,2017 dan 2019, hanya tahun 2018 yang mengalami penurunan. Bila di banding dengan total belanja pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sehingga bertolak belakang dengan total belanja yang mengalami penurunan. Bila dilihat dari porsi besaran belanja maka porsi untuk belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung, dengan demikian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan dananya pada belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung.

Menurut Mahmudi (2016:154), belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD dan rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap APBD yang ideal, karena

sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan relatif besar sehingga seharusnya belanja modal lebih besar dari belanja operasi.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2017) tentang Analisis Keuangan Daerah di Tinjau dari Rasio Keuangan dimana Rasio keserasian masih diperioritaskan belanja operasi. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh ingriani (2016) tentang Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana belanja operasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih lebih tinggi dari belanja modal.

Hal ini berarti kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari keserasian belanja masih kurang serasi karena seharusnya antara operasi dan belanja modal dan antara belanja langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Analisa Efisiensi Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja di kalikan 100%.

Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat dari efisiensi belanja. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila di lihat dari

penghematan anggaran dari tahun 2015 sampai 2018 dimana tahun 2015 terdapat penghematan anggaran sebesar 11,38%, tahun 2016 terdapat penghematan anggaran sebesar 20,35%, tahun 2017 terdapat penghematan anggaran sebesar 9,36%, tahun 2018 terdapat penghematan anggaran sebesar 7,46%. Sedangkan tahun 2019 mengalami pelampaian anggaran sebesar 8,12%, hal ini disebabkan tidak adanya APBD Perubahan pada tahun 2019 sehingga dana-dana pusat seperti DBH, Dana DAK dan dana pusat lainnya dilakukan pergeseran anggaran sehingga realisasi belanja melampaui anggaran murni APBD.

Menurut Mahmudi (2016:154), Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Penghematan belanja banyak dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukaya (2017) tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dimana Rasio Efisiensi rata-rata sebesar 92%.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari efisiensi belanja maka sudah baik karena rata-rata belanja dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penghematan belanja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi maka berikut ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu

1. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari pertumbuhan belanja megalami kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya.
2. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari keserasian belanja masuh kurang serasi karena seharusnya antara operasi dan belanja modal dan antara belanja langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing dan mengalami kenaikan setiap tahunnya.
3. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi bila dilihat dari efisiensi belanja maka sudah baik karena rata-rata belanja dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penghematan belanja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas diajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan dananya pada belanja operasi dibandingkan pada belanja modal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset-aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cristian, Indra Lontaan. 2016. *Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten*.
- Darmawan, Deni. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Darise, Nurlan, 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji dan Yuliawati Tan. 2010. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Gege Edi Prasetyo. 2010. *Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad. Gade. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- M Nafarin. 2012. Penganggaran. Salemba empat. Jakarta.
- Ratna. Dewi. 2010. *Sistem Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.

- Rudianto. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Grasindo. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemarso, S. R. 2012. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1 Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Daling, Marchelino. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 September 2015. ISSN 2303-1174. Hal. 82-89. Diakses pada 05 April 2019.
- Friska, Anastasia Palilingan, dkk. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1 Maret 2015. ISSN 2303-1174. Hal. 17-25. Diakses tanggal 24 April 2019.
- Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 1 Maret. 2016 ISSN 2303-1174. Hal. 898-906.
- Sharon, Ariel Sumenge. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 September 2013. ISSN 2303-1174. Hal. 74-81.
- Yunita, Grace Liando. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 1 Maret 2016. ISSN 2303-1174. Hal. 1473-1484.

Peraturan Perundang-undangan:

- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusutan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.